KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: humas@kemenkopangan.go.id

SIARAN PERS
No. 08M/SES.M.PANGAN/SP/11/2026

Menko Pangan di Global MSP Forum 2026: Masyarakat Pesisir Harus Dilibatkan Sejak Perencanaan

Bali, 25 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan masyarakat pesisir harus dilibatkan sejak tahap perencanaan penataan ruang laut atau Marine Spatial Planning (MSP). Hal itu disampaikan Menko Pangan saat menghadiri Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 di Bali.

“Masyarakat pesisir tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat, tetapi harus ikut menentukan arah pemanfaatan ruang laut agar kebijakan pengelolaan laut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pesisir perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pembagian manfaat harus dilakukan secara adil, disertai peningkatan kapasitas masyarakat agar manfaat ekonomi tetap berlanjut,” ujar Menko Pangan.

Menko Pangan menjelaskan penataan ruang laut kedepan mengatur berbagai kepentingan secara terintegrasi, mulai dari wilayah perikanan tangkap, kawasan budidaya, pariwisata, infrastruktur, hingga konservasi. Pengaturan ini juga memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem.

Selama ini, Marine Spatial Planning atau Perencanaan Tata Ruang Laut, kerap dipahami sebatas instrumen perencanaan dan pembagian zonasi laut. Padahal, penataan ruang laut juga harus menjadi instrumen untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber pangan nasional. Pelibatan masyarakat sejak awal juga penting untuk mencegah konflik dan persoalan dalam pemanfaatan ruang laut di kemudian hari.

Upaya tersebut berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur sektor perikanan. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah membangun berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan, mulai dari pabrik es, cold storage, bengkel, fasilitas logistik BBM, hingga balai lelang. Fasilitas ini diharapkan membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan daya tawar saat menjual ikan.

Pada tahap awal, program KNMP mencakup 100 kampung nelayan. Pada tahun 2026, cakupan program diperluas dengan pembangunan di 1.269 lokasi. Pemerintah juga mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan, antara lain Pelabuhan Perikanan Pengambengan di Bali, dengan target peningkatan kapasitas pendaratan ikan dari 61.300 ton menjadi 124.000 ton per tahun.

“Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat di sentra perikanan, meningkatkan konektivitas logistik, dan mengefisienkan distribusi pangan akuatik,” Ujar Menko Pangan.

Global MSP Forum 2026 merupakan forum internasional yang mempertemukan pemerintah, organisasi, akademisi, lembaga keuangan, investor, pelaku usaha, komunitas pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas masa depan pengelolaan ruang laut dunia.

Turut hadir dalam Global MSP Forum 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ketua Komisi IV DPR RI, Gubernur Bali, Kepala dan Spesialis Program Subkomisi Oseanografi UNESCO untuk Pasifik Barat, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Ketua Eksekutif Konservasi Indonesia, para delegasi negara serta, perwakilan organisasi internasional.

Narahubung

Dr. Gunawan
Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat